



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Telp 31401-31402-34425 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> biro_humas@sumbarprov.go.id

PENGUMUMAN

PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT FORMASI TAHUN 2021

Nomor : 800/8862/BKD-2021

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GURU
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
FORMASI TAHUN 2021

Merujuk pada surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 19456/B-MP.01.02/SD/D/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Penyelesaian penetapan NI PPPK Guru Tahun 2021 secara elektronik, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Peserta seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Guru Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Formasi Tahun 2021 Tahap I dan Tahap II yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi, dapat dilihat pada laman <http://sscasn/bkn.go.id> melalui akun masing-masing peserta;
2. Peserta seleksi CPPPK Guru sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, dinyatakan berhak mengikuti proses pemberkasan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK;
3. Dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal **24 Desember 2021 sampai dengan 10 Januari 2022**, yaitu:
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diisi dilaman <https://sscasn.bkn.go.id> dan dicetak serta ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan materai 10000;
 - d. Surat Pernyataan 5 (lima) point yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10000, yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan masih berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani terbaru dan masih berlaku dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - g. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang terbaru dan masih berlaku, yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
4. Dokumen fisik, berupa:
- a. Fotokopi Ijazah legalisir yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - b. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan materai 10000;
 - c. Surat Pernyataan 5 (lima) point yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan materai 10000;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan masih berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani terbaru dan masih berlaku dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - f. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang terbaru dan masih berlaku yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
5. Dokumen sebagaimana tersebut pada angka 4, disusun rapi dan dimasukkan ke dalam map berwarna merah dan diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Jalan Batang Antokan No. 4 Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang melalui PT. Pos Indonesia, selambat-lambatnya tanggal 11 Januari 2022 cap pos;
6. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Padang, 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PELAYANAN KELOMPOK KERJA PANITIA SELEKSI,



DR. KRANSASTRI, MM.

Pembina Utama

NIP.19641013 199103 1 001

CONTOH SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POINT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan,

Materai 10000

.....

Catatan : Surat pernyataan diketik dan ditandatangani di atas materai